**ABSTRAK**

Akses masyarakat tehadap keadilan merupakan, Hak Asasi Manusia bagi setiap warga Negara, untuk itu maka sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memenuhinya. Namun dalam implementasinya hal tersebut jauh dari harapan, dimana akses keadilan bagi masyarakat marginal jauh dari kenyataan. Sementara itu keberadaan advokat sebagai profesi yang memberikan bantuan hukum belumlah memadai bila dilihat dari kuantitasnya dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. Identifikasi masalah terdiri dari bagaimana peran dan kedudukan para legal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kendala-kendala apa yang muncul kaitannya dengan peran dan tugas kedudukan paralegal dalam system peradilan pidana, upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi atau mengatasi kendala-kendala yang muncul mengenai peran fungsi dan kedudukan paralegal dalam sistem peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

 Penulisan tesis ini dilakukan secara deskriptif analisis berupa penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual dari masalah paralegal dalam aktivitas bantuan hukum. Penulis dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian dilakukan dengan mendasarkan pada penelitian kepustakaan atau data skunder dan penelitian lapangan.

 Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam sistem hukum Indonesia tidak ada satu ketentuanpun yang mengatur mengenai paralegal. Paralegal dapat eksis karena mereka mengisi kelemahan dalam implementasi dari Undang-Undang yang mengatur masalah bantuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Peranan paralegal sebagai fasilitator masyarakat sedangkan peranan paralegal dalam hubungannya dengan komponen-komponen sistem peradilan pidana adalah paralegal membantu dan mengurus serta menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi oleh kliennya yang bukti-buktinya diperoleh sebelum ditangani oleh advokat. Kendala-kendala yang sering dihadapi oleh mereka dalam memberikan bantuan hukum adalah belum adanya legitimasi formal bagi paralegal dalam sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan, minimnya dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tempat sebagian paralegal bernaung dan masalah tingkat pendidikan formal bagi paralegal yang belum merata, untuk itu perlu adanya pengaturan yang jelas sebagai asas legalitas bagi setiap paralegal dalam menjalankan tugasnya.

Paralegal sangatlah diperlukan dimasyarakat dalam aktvitasnya, namun hanya sebatas membantu para advokat karena paralegal tidak mempunyai dasar hukum yang kuat tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dirasakan dapat membantu dalam menjalankan aktifitas bantuan hukum bagi masyarakat yang miskin.

Kata Kunci : Kesenjangan, kelemahan, kekosongan, paralegal.

***ABSTRACT***

 *Public access in justice is human rights for every citizen, for it then it is obligatory for the State to fulfill. But in terms of its implementation is far from complete, in which access to justice for marginalized communities far from reality. While the presence of lawyers as a profession that provides legal assistance is inadequate when viewed from the quantity compared with the population and area of ​​Indonesia. How to Identify the problem consists of the legal role and position in the criminal justice system in Indonesia, what constraints that arise related to the role and duties of a paralegal position in the criminal justice system, efforts to what can be done to mitigate or overcome obstacles that arise regarding the role and function of a paralegal position in the criminal justice system associated with the Law No. 18 Year 2003 on Advocates jo Law No 8 Year 1981 on KUHAP jo Law No 16 Year 2013 on help Law*

 *This thesis conducted a descriptive analysis of the review and analysis of the provisions of the applicable legislation, where this method has the goal to provide a systematic and factual overview of the problem of paralegals in the legal aid activities. The author in this thesis using a normative approach, which is based on research conducted by library research or secondary data and field research.*

 *Can be concluded that the Indonesian legal system no one provision regulating paralegals. Paralegals can exist because they fill a weakness in the implementation of the Act which governs the legal assistance such as Law No. 18 Year 2003 on Advocates jo law Decree No. 8 Year 1981 on KUHAP jo Law No 16 Year 2013 on Help Law Paralegal role as facilitator of society whereas the role of paralegals in conjunction with the components of the criminal justice system is a paralegal help and care as well as to resolve cases faced by his client that the evidence obtained before handled by lawyers. Constraints often faced by them in providing legal aid is the absence of formal legitimacy for paralegals in a provision of legislation, lack of funds owned by the institutions where most paralegals shelter and problems of formal education for paralegals are not evenly distributed, to the need for clear regulation as the principle of legality for every paralegal in performing of duties.*

*Para legals it be required in the community in activities, however only limited assist the advocate because paralegals does not have the legal basis strong.*

*Keywords: Inequality, weakness, emptiness, paralegal.*

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahir Rahmaanir Rahiim*

 Puji syukur penulis panjatkan Khadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang menghadirkan segala pembelajaran hidup dan segala anugrah-Nya yang bermakna demi penyempurnaan diri. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah S.A.W. keluarga dan sahabatnya.

 Tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian sidang Magister Hukum pada program kehususan Ilmu Hukum Pidana Universitas Pasundan Bandung, Tesis ini berjudul :

"Kedudukan dan Peranan Paralegal Dalam Aktivitas Bantuan Hukum Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum".

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. H Aan Burhanudin SH.,M.Hum. (alm), Dr. H. Jaja Achmad Jayus, SH.,M.Hum, Hj. Tien S. Hulukati SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan serta ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini berbagai kendala dalam penyusunannya, dan tidak akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak serta tidak lepas dari pikiran dan budi akal baik banyak orang.

Oleh karena itu dengan kesungguhan hati, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang bernama :

1. Dr. H. Jaja Achmad Jayus, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Deden Sumantry, SH.,MH. Selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Hj. Tien S. Hulukati, SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing;
4. Segenap dosen dari staf pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan dalam proses perkuliahan;
5. Serta seluruh Karyawan akademik atas pelayanan yang diberikan.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Negeri Garut Bapak Tito Suhud, SH. beserta seluruh staf lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan informasi dan data dalam penyusunan tesis ini;
2. Ketua LBH Rek Kabupaten Garut, yaitu Bambang Irawan, SH. yang memberikan informasi dan data untuk menunjang dalam penyusunan tesis ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Isteriku tercinta Ny. Tuti Susilawati SH, yang tidak henti-hentinya mendorong dan memotifasi dalam penyelesaian tesis ini;
2. Seluruh teman-teman Pasca Sarjana Program Ilmu Hukum Pidana Universitas Pasundan Bandung yang memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh, dari kata sempurna walaupun telah berusaha semaksimal mungkin. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kesempurnaan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

 Semoga Allah SWT. memberikan balasan yang sebesar-besarnya atas jasa- jasa kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Billahil taufik walhidayah Wassalamu alaikum Wr.Wbr.

 Bandung, Juli 2014

 **ANUNG ANSHORI**

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN i

LEMBAR PERNYATAAN ii

ABSTRAK iiii

ABSTRACT iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAB I : PENDAHULUAN

 A. Latar Belakang Penelitian 1

 B. Identifikasi Masalah 8

 C. Tujuan Penelitian 8

 D. Kegunaan Penelitian 9

 E. Kerangka Pemikiran 10

 F. Metode Penelitian 16

BAB II : PARALEGAL DAN GERAKAN BANTUAN HUKUM DI INDONESIA

 A. Pengertian Paralegal dan Gerakan Bantuan Hukum 21

 B. Aktivitas Paralegal Dalam Menunjang Gerakan Bantuan Hukum 24

 C. Paralegal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia 29

 D. Konsep Bantuan Hukum di Indonesia 49

BAB III : HASIL PENELITIAN LAPANGAN TENTANG PENYIMPANGAN PARALEGAL DALAM GERAKAN BANTUAN HUKUM

1. Hal-hal yang Mendorong Paralegal dalam Pemberian Aktivitas Bantuan Hukum 76
2. Permasalahan dan Tantangan Yang Dihadapi Advokat 81

 C. Langkah-langkah Paralegal Dalam Menjalankan Aktivitas Bantuan Hukum 84

BAB IV : PEMBAHASAN MENGENAI PERANAN DAN KEDUDUKAN PARALEGAL DALAM AKTIVITAS BANTUAN HUKUM DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP

 A. Peran dan Kedudukan Paralegal dalam sistem Peradilan Pidana di Indonesia 93

 B. Kendala-kendala Yang Muncul dalam Kaitannya Dengan Peran dan Tugas Kedudukan Paralegal Dalam System Peradilan Pidana 98

 C. Upaya-upaya Yang Dilakukan Paralegal Dalam Menghadapi Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Proses Bantuan Hukum 104

BAB V : PENUTUP

 A. Kesimpulan 112

 B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 115